

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Republik Indonesia adalah Negara kesatuan. Sebagai negara kesatuan, maka daerah merupakan bagian yang tak terpisahkan untuk melaksanakan pemerintahan. Berdasarkan pasal 18 UUD 1945 dan sesuai dengan otonomi yang diberikan kepada daerah, maka daerah diberi wewenang oleh pemerintah pusat untuk mengurus rumah tangganya sendiri dan kepadanya diberikan sumber-sumber pendapatan yang cukup.¹ Daerah Kabupaten atau Kota memiliki kewenangan pula untuk membuat kebijakan daerah untuk memberikan pelayanan kepada publik dengan baik, meningkatkan peran serta prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Hubungan keuangan dan daerah dalam rangka otonomi daerah dilakukan dengan membedakan fungsinya secara efektif. Untuk melaksanakan fungsi tersebut harus ada dukungan sumber-sumber keuangan yang memadai baik yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, Pinjaman Daerah maupun lain-lain penerimaan yang sah.

¹S.F. Marbun, *Hukum Administrasi Negara I*, (Yogyakarta: UII Press, 2012), hlm.123.

Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah terdiri dari:²

1. Pendapatan Asli Daerah;
2. Pinjaman Daerah; dan
3. Lain-lain pendapatan.

Sedangkan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) seperti yang tertuang pada poin 1 terdiri dari:

1. Pajak Daerah;
2. Retribusi Daerah;
3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

Berdasarkan undang-undang tersebut berarti Pajak Daerah dan retribusi daerah memiliki peranan yang potensial sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah dilakukan oleh masing-masing daerah dan selanjutnya digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan yang berkelanjutan. Retribusi sebagai salah satu sumber penerimaan daerah tidak dapat diabaikan perannya dalam usaha peningkatan pendapatan daerah. Penerimaan dari sektor retribusi merupakan sumber pendapatan yang paling penting dalam mengisi kas daerah guna membiayai kegiatan pemerintah daerah dalam rangka pembangunan daerah. salah satu pungutan retribusi daerah adalah retribusi pasar.

Retribusi pasar atau retribusi pelayanan pasar adalah fasilitas pasar tradisional/sederhana berupa pelataran, los yang dikelola pemerintah daerah, dan

² Ahmad Yani, *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002), hlm.39.

khusus disediakan untuk pedagang, tidak termasuk yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan pihak swasta.³ Manfaat retribusi bagi para pengguna pasar antara lain untuk memenuhi serta meningkatkan pelayanan dalam hal penyediaan, penggunaan dan perawatan fasilitas pasar yang berupa halaman atau pelataran, kios dari pemerintah. Sedangkan manfaat retribusi pasar untuk pemerintah daerah adalah sebagai salah satu sumber pemasukan retribusi daerah yang cukup potensial untuk mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD).⁴

Diantara berbagai jenis penerimaan daerah yang menjadi sumber daya sepenuhnya dapat dikelola oleh daerah adalah dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), oleh karena itu perlu mendapatkan perhatian yang serius dari pemerintah daerah baik dengan cara intensifikasi maupun dengan cara ekstensifikasi dengan maksud agar daerah tidak terlalu mengandalkan/menggantungkan harapan pada pemerintah tingkat atas tetapi harus mampu mandiri sesuai cita-cita otonomi yang nyata dan bertanggung jawab. Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan masing-masing dalam membiayai rumah tangganya sendiri serta untuk pembangunan yang berkelanjutan.⁵

Dalil yang menjadi dasar disyariatkannya adalah bersumber dari ayat Al-Qur'an surah Al-Furqan/ 25: 7.

³ *Ibid*, hlm.57.

⁴ Kesit Bambang Prakosa, *Pajak dan Retribusi Daerah*, (Yogyakarta : UII Press, 2005), hlm. 105.

⁵ Kaho, J. Riwu, "*Analisis Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah*", (Jakarta : Bina Aksara : 1988), hlm. 94.

وَقَالُوا مَالِ هَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ لَوْلَا أَنْزَلَ إِلَيْهِ
مَلَكٌ فَيَكُونُ مَعَهُ وَنَذِيرًا ﴿٧﴾

“Dan mereka berkata: "Mengapa Rasul itu memakan makanan dan berjalan di pasar-pasar? mengapa tidak diturunkan kepadanya seorang Malaikat agar Malaikat itu memberikan peringatan bersama- sama dengan dia” .⁶

Berdasarkan ayat diatas, dapat dikatakan bahwa dari sisi pengelolaan dan pengawasan pasar, Rasul mempunyai perhatian yang besar terhadapnya. Rasul berkeliling sendiri di pasar-pasar untuk mengawasi transaksi didalamnya untuk meluruskan penyimpangan dan menghukum orang-orang yang menyimpang.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 18 Tahun 2008 tentang Retribusi Pelayanan Pasar, retribusi pasar dikenakan bagi pedagang atau pengusaha yang memanfaatkan fasilitas pasar. Fasilitas pasar yang dikenai retribusi di pasar-pasar yang berada di wilayah Kota Banjarmasin yaitu untuk pemakian kios, los dan pelataran serta pelayanan persampahan dan pemakaian listrik. Retribusi pasar di Kota Banjarmasin dipungut menggunakan SKRD atau Surat Ketetapan Rertribusi Daerah, oleh petugas Dinas Pengelolaan Pasar. SKRD yang dipergunakan dalam pemungutan retribusi pasar tersebut adalah dalam bentuk kartu atau karcis. Kartu yang digunakan untuk memungut retribusi bagi pedagang berjualan di los atau kios, sedangkan karcis dipergunakan untuk memungut retribusi bagi pedagang yang berjualan di pelataran.

⁶ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Surabaya : duta ilmu, 2005).

Tabel 1.1
Pendapatan Retribusi Pasar di Kota Banjarmasin dari Tahun 2014-2016

Nama Pasar	2014 (Rp)	2015 (Rp)	2016 (Rp)
Baru permai Dasar	9.391.850,40	35.832.262,20	102.712.475,20
Baru Permai LT.1	1.046.438,30	41.058.572,60	96.232.214,02
Baru Permai Khusus	0,00	10.039.450,00	15.837.360,00
Niaga Timur	3.443.205,00	1.039.151,11	17.874.838,57
Block Anda Optikal	0,00	39.166.620,00	65.734.620,00
Samping Cempaka	0,00	632.963,36	2.224.244,00
Block Odi	0,00	0,00	4.472.960,00
Titipan Sepeda	0,00	0,00	0,00
Block Ansyar	379.575,00	8.733.200,00	4.714.000,00
Samping Pasar Ayam	0,00	0,00	2.318.264,87
Sudi Rapi	0,00	0,00	0,00
Ex. Pompa Bensin	0,00	0,00	9.625.212,50
Block Samping Kapitol	0,00	0,00	0,00
Daging	1.839.520,00	938.800,00	1.094.087,83
Lima Laut	0,00	0,00	0,00
Lima Beton	18.891.785,00	3.838.720,00	14.855.255,00
Sandang Pangan	3.219.720,00	0,00	5.213.256,00
Block Hanifah	0,00	1.280.840,00	55.118.630,00
Permata	1.979.910,00	0,00	3.649.591,60
Atom Kilat	0,00	21.996.568,00	29.840.449,00
Samping Atom Kilat	0,00	5.311.575,00	2.490.885,00
Ujung Murung	0,00	1.028.800,00	462.800,00
Muka Jembatan Sudimampir	0,00	0,00	876.060,00
Telawang Baru	3.215.185,00	11.147.360,00	7.693.848,00
Pekauman Inpres	134.160,00	20.485.092,00	42.080.937,00
Kampung Geadang	6.915.156,00	23.153.300,00	32.023.196,00
Lima Thp I	530.150,00	0,00	6.416.624,00
Lima Thp II	6.711.840,00	2.607.100,00	12.256.090,00
Lima Thp III	8.237.235,00	619.237,50	12.066.005,10
Lima Thp IV	5.189.830,00	1.253.860,00	5.071.980,00
Lima Thp V	0,00	1.014.300,00	10.193.400,00

Lima Thp VI	715.050,00	715.050,00	7.122.381,60
Kuripan + Lt.1	14.599.701,20	118.438.672,73	82.728.272,18
Abadi Beton	0,00	22.492.055,00	12.749.254,95
Abadi Miring/Kayu/Laut	13.953.387,00	27.241.566,00	14.582.127,00
Teluk Dalam	0,00	25.083.327,00	54.178.193,94
Terminal Km.6	0,00	0,00	6.603.173,60
Pandu	6.531.810,00	36.794.705,00	15.580.945,00
Pekauman	881.400,00	12.483.393,50	29.429.481,50
Niaga Lt. II	3.244.257,70	3.212.710,60	16.349.160,77
Kupu-Kupu	0,00	0,00	289.229,20
Baru Permai Miring	0,00	1.027.245,38	1.912.921,38
Baru Permai Miring Lt.I	0,00	6.836.976,00	9.173.180,00
Lima Beton Lt. II	0,00	0,00	2.793.600,00
Telawang Baru Lt. I	0,00	722.750,00	1.233.250,00
Niaga Timur Lt. III	0,00	4.576.400,00	6.129.550,00
Samping Sudimampir Lt. Dasar	0,00	4.777.225,00	800.400,00
Block Keramik	4.167.108,00	21.142.528,00	8.762.003,00
Pasar Kembang	6.967.987,50	27.777.545,00	7.410.573,00
Belakang Pasar Sudimampir	0,00	1.513.050,00	0,00
Malabar	14.167.755,00	13.119.337,50	23.813.295,00
Sudimampir Lt. III	0,00	0,00	805.956,80
Induk Banjar Raya	7.326.656,25	36.425.641,15	14.853.111,20
Cemara	2.932.406,25	19.460.046,25	44.220.615,00
Jahri Saleh	5.457.328,00	5.163.656,00	11.467.440,25
Kuripan LT.I	698.355,00	18.032.346,00	19.221.057,75
Teluk Dalam Muara Lt. I	0,00	12.542.967,00	16.962.024,50
Pandu Lt. I	0,00	12.330.530,00	5.497.896,00
Teluk Dalam Ex Pkl	0,00	2.013.130,80	9.248.462,64
Malabar Lt.I	0,00	7.601.881,50	3.541.882,75
Total	4.244.743.467,00	8.336.238.620,00	6.337.323.369,00

Sumber: Dinas Pengelolaan Pasar

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa dari tahun 2014-2016 pendapatan retribusi pasar masih banyak yang kosong dan juga ada terdapat beberapa pasar yang mengalami penurunan tiap tahunnya. Hal ini disebabkan karena kurangnya pengelolaan dari Dinas Pengelolaan Pasar itu sendiri. Peran Pemerintah sangat menunjang sekali dalam peningkatan penerimaan retribusi pasar.

Penulis tertarik mengangkat tema pengelolaan retribusi pasar karena melihat potensi pasar di kota Banjarmasin yang cukup besar, pengelolaannya memang harus dioptimalkan. Pengelolaan retribusi pasar harus dilaksanakan dengan baik sesuai dengan Peraturan Daerah supaya memperoleh pemanfaatan hasil yang optimal untuk kesejahteraan bersama. Adapun hal yang paling nyata salah satunya adalah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk mengambil judul penelitian **Pengelolaan Retribusi Pasar Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Banjarmasin.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas,, maka permasalahan yang akan diteliti adalah:

1. Bagaimana Pengelolaan Retribusi Pasar di Kota Banjarmasin dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah ?
2. Apa saja faktor-faktor pendorong dan penghambat dalam Pengelolaan Retribusi Pasar di Kota Banjarmasin ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penulis dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Untuk mengetahui bagaimana Pengelolaan Retribusi Pasar di Kota Banjarmasin dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah ?
2. Untuk mengetahui faktor-faktor pendorong dan penghambat dalam Pengelolaan Retribusi Pasar di Kota Banjarmasin.

D. Signifikansi Penelitian

1. Sebagai bahan masukan untuk menentukan arah kebijakan dalam pengelolaan atau pengembangan pasar.
2. Sebagai bahan masukan untuk masyarakat tentang pengelolaan retribusi pasar terhadap pendapatan daerah di kota Banjarmasin.
3. Kepentingan studi ilmiah atau sebagai terapan disiplin ilmu kesyariahan.
4. Menambah wawasan dan ilmu pengetahuan penulis dan pembaca pada khususnya tentang masalah ini maupun dari sudut pandang yang berbeda.
5. Bahan Literatur untuk menambah khazanah Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin, khususnya untuk Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam.

E. Definisi Operasional

Sebagai pedoman agar terarahnya penelitian ini dan tidak menimbulkan kesalahpahaman maka perlu dijelaskan melalui batasan istilah, yaitu :

1. Pengelolaan adalah proses, cara, perbuatan mengelola atau proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain. (Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kamus *Besar Bahasa Indonesia*).
2. Retribusi adalah pungutan sebagai pembayaran atas suatu pemakaian dengan prestasi kembalinya secara langsung.⁷ Retribusi dalam penelitian ini adalah pembayaran yang dibebankan kepada pedagang yang beroperasi pada pasar-pasar milik Pemerintah Kota Banjarmasin.
3. Pasar adalah sebagai tempat bertemunya para penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi. Pengertian ini mengandung arti pasar memiliki tempat atau lokasi tertentu sehingga memungkinkan pembeli dan penjual bertemu. Di dalam pasar terdapat penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli produk, baik barang maupun jasa.⁸ Pasar yang dimaksud di sini adalah pasar-pasar milik Pemerintah Kota Banjarmasin.
4. Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan

⁷ SF, Marbun, *Op Cit*, hlm.137.

⁸ Kasmir, *Kewirausahaan*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 156.

peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁹

F. Kajian Pustaka

Kajian Pustaka sangat diperlukan untuk menghindari penelitian yang sama dengan penelitian yang akan diteliti. Oleh karena itu penulis melakukan penelaahan terhadap penelitian penelitian terdahulu yang berkaitan dengan permasalahan pengelolaan. Ada beberapa penelitian yang penulis temukan yang berhubungan dengan penelitian yang akan penulis teliti diantaranya:

Tabel 1.2
Kajian Pustaka

No	Nama/NIM	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Hasan Basri (1101150147) Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Antasari Banjarmasin	<i>“Retribusi Jasa Pasar Dalam Peremajaan Pasar Tradisional Milik Pemerintah Kota Banjarmasin”</i>	Penelitian ini dilatarbelakangi oleh fasilitas yang kurang memadai, pasar tradisional yang terkesan kumuh, kotor, semraut, dan bau. Sehingga, mengakibatkan sebagian dari pengunjung mencari alternative tempat belanja lain, diantaranya mengalihkan tempat berbelanja ke pasar swalayan yang biasanya lebih mementingkan kebersihan dan kenyamanan. Berdasarkan hasil penelitian bahwa pengelolaan retribusi jasa pasar di kota Banjarmasin sudah dapat berjalan cukup baik, Dinas Pasar Kota Banjarmasin melakukan perbaikan dan

⁹ Ahmad Yani, *Op Cit*, hlm.39.

			revitalisasi terhadap 15 pasar dan merevitalisasi 2 pasar tradisional. Selain itu, Dinas Pasar Kota Banjarmasin memberikan bimbingan dan teknis kepada para pedagang bersama para pengelola pasar tradisional tentang cara berjualan yang baik, seperti mengupayakan dan memelihara kebersihan pasar. ¹⁰
2.	Bayu Setyo Sasongko (0808101061) Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Jember	<i>“Analisis Pengelolaan Retribusi Pasar di Kabupaten Jember”</i>	Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proporsi penerimaan retribusi pasar di masing-masing pasar di kabupaten Jember. Hasil analisis proporsi menunjukkan bahwa retribusi pasar rata-rata sebesar 3,2 persen. Dilihat dari analisis efektivitas realisasi penerimaan retribusi pasar di kabupaten Jember selalu mencapai target yang telah ditetapkan dengan rata-rata pencapaian sebesar 108,09 persen. ¹¹
3.	Isna Maudiotin Hasanah (3401401028) Universitas Negeri Semarang	<i>“Pengelolaan Retribusi Pasar untuk Meningkatkan Pelayanan Publik di Pasar Johar Semarang”</i>	Penelitian ini mengangkat masalah mengenai bagaimana pengelolaan retribusi Pasar Johar Semarang, bagaimana pula persepsi pedagang mengenai pengelolaan tersebut untuk meningkatkan pelayanan publik di Pasar Johar serta faktor yang mendukung dan

¹⁰ Hasan Basri , *Retribusi Jasa Pasar Dalam Peremajaan Pasar Tradisional Milik Pemerintah Kota Banjarmasin*, (FSEI UIN Antasari Banjarmasin), hlm.6.

¹¹ Bayu Setyo Sasongko, *Analisis Pengelolaan Retribusi Pasar di Kabupaten Jember*,(Fakultas Ekonomi Universitas Jember), hlm. 6.

			<p>menghambat pemerintah dalam meningkatkan pelayanan tersebut dari retribusi yang ada. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan retribusi pasar sudah dilakukan cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari pelaksanaan aspek-aspek dalam mengelola retribusi pasar yang meliputi sistem administrasi yang cukup baik. Faktor yang mendukung adalah kesadaran para pedagang untuk swadaya dalam memenuhi pelayanan publik mereka. Sedangkan faktor penghambat pemberian pelayanan adalah masih banyak PKL yang tidak berizin dan kurangnya kesadaran pedagang untuk membayar retribusi tepat waktu dan sesuai tarif.¹²</p>
4.	<p>Masdalina (1301150153) Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Syariah & Ekonomi Islam UIN Antasari Banjarmasin</p>	<p><i>"Pengelolaan Retribusi Pasar Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Banjarmasin"</i></p>	<p>Penelitian ini dilatar belakangi oleh potensi pasar di kota Banjarmasin yang cukup besar, pengelolannya memang harus dioptimalkan. Hal ini tentunya juga akan meningkatkan penerimaan retribusi pasar, peningkatan retribusi pasar akan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan pendekatan deskriptif kualitatif, yaitu gambaran tentang bagaimana pengelolaan retribusi pasar dalam meningkatkan</p>

¹² Isna Maudiotin Hasanah , *Pengelolaan Retribusi Pasar untuk Meningkatkan Pelayanan Publik di Pasar Johar Semarang* (Jurusan Hukum Bisnis Universitas Negeri Semarang), hlm.6.

			<p>pendapatan asli daerah Kota Banjarmasin dan kendala apa yang dihadapi oleh Dinas Pengelolaan Pasar. Data diperoleh dengan menggunakan teknik wawancara dengan para informan.</p> <p>Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan retribusi pasar melalui pihak Dinas Pengelolaan Pasar Kota Banjarmasin telah berupaya memberikan pengelolaan secara maksimal bisa dilihat dari pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya. Faktor pendorong dalam pengelolaan retribusi pasar adalah dengan melakukan revitalisasi pasar baik dalam dari segi pembenahan pasar, kebersihan, parkir, dan fasilitas lainnya. Sedangkan, yang menjadi faktor penghambat dalam pengelolaan retribusi pasar ini antara lain masih banyak pedagang yang menunggak pembayaran, faktor cuaca, tidak adanya fasilitas pendukung bagi petugas pemungut, dan ketidakmahiran petugas dalam berinteraksi dengan pedagang. Sedangkan kontribusi penerimaan retribusi pasar Kota Banjarmasin selama tiga tahun terakhir yaitu antara tahun 2013 sampai dengan tahun 2015 sebesar Rp 16.141.900.311,00 dengan rata-rata sebesar Rp 5.380.633.473,00 per tahun</p>
--	--	--	--

			3.266.666.666,00 dan 21,1 %. Walaupun masih terlihat kecil tapi setiap tahunnya hampir selalu mengalami peningkatan dan berdasarkan hal tersebut dapat dilihat bahwa pengelolaan retribusi pasar Kota Banjarmasin berpotensi dalam ikut mendukung Pendapatan Asli Daerah.
--	--	--	---

Sumber: Olah Data (2017)

Dari gambaran kajian pustaka sebagaimana yang terdapat dalam tabel di atas maka dengan jelas terdapat perbedaan antara peneliti terdahulu dengan yang penulis teliti.

G. Sistematika Penulisan

Penyusunan skripsi ini terdiri dari lima bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I adalah pendahuluan merupakan bab yang akan menguraikan latar belakang masalah dan alasan memilih judul serta gambaran dari permasalahan yang diteliti. Permasalahan yang telah tergambarkan dirumuskan dalam rumusan masalah, setelah itu disusun dalam tujuan penelitian yang merupakan hasil yang diinginkan. Signifikansi penelitian merupakan kegunaan hasil penelitian. Definisi Operasional untuk membatasi istilah-istilah dalam penelitian yang bermakna umum atau luas. Kajian pustaka ditampilkan sebagai adanya informasi tulisan atau penelitian dari aspek lain. Adapun sistematika penelitian merupakan susunan skripsi secara keseluruhan.

Bab II landasan teoritis, yaitu suatu teori untuk memecahkan masalah yang membahas tentang pengertian pasar, pengelolaan pasar, keuangan daerah dan pendapatan daerah yang akan dijadikan sebagai tolak ukur dari penyajian data yang ditemukan dan sebagai pedoman dalam penganalisaan data.

Bab III adalah, membahas metode penelitian untuk mempermudah dalam melakukan penelitian maka perlu dibuat jenis sifat dan lokasi penelitian. Dalam melakukan penelitian agar tepat sasaran apa yang ingin dicapai maka perlu adanya subjek dan objek penelitian. Data dan sumber data sangat diperlukan dalam penelitian ini agar hasil dari penelitian ini menjadi jelas dan valid. Dalam pengumpulan data harus ada suatu cara agar dapat terkumpul dengan akurat dan efektif, maka perlu adanya teknik pengumpulan data dan agar data yang terkumpul nantinya harus lengkap dan jelas maka buatlah teknik pengolahan dan analisis data, kemudian dalam melakukan penelitian ini ada tahapan-tahapan yang dimasukkan dalam prosedur penelitian.

Bab IV penyajian data yang terdiri dari gambaran umum lokasi penelitian, pengelolaan pasar di Kota Banjarmasin dan kontribusi untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) kota Banjarmasin.

Bab V merupakan penutup terdiri dari simpulan dan saran yang merupakan bagian terakhir dalam penelitian ini yang memuat tentang hal-hal yang dihasilkan dan diperoleh dalam penelitian secara singkat namun jelas.